

BAB V

MESIR PASCA REVOLUSI MESIR 23 JULI 1952

A. Masa Transisi Politik Mesir

Turunnya Farouk dari tahta tertinggi Mesir mengakibatkan kosongnya pemerintahan, sehingga Dewan Mangkubumi yang lebih didominasi oleh *Revolutionary Command Council* menjalankan politik Mesir sampai dengan tahun 1953. Langkah pertama yang diambil oleh *Revolutionary Command Council* adalah membubarkan partai politik yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 1953.¹ Diumumkan pula kepada seluruh masyarakat Mesir bahwa selama masa transisi, seluruh kebijakan politik diatur sepenuhnya oleh *Revolutionary Command Council* baik mengenai kebijakan dalam dan luar negeri. Pemerintahan di bawah *Revolutionary Command Council* direncanakan akan berjalan selama tiga tahun, sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 10 Februari 1953.

Revolutionary Command Council yang didalangi oleh pemikiran Gamal Abdul Nasser ini, menjalankan pemerintahan Mesir dengan semangat revolusioner. Secara umum, memang belum banyak yang berubah dari tatanan sebelumnya. *Revolutionary Command Council* cenderung mengisi kekosongan pemerintahan saja tanpa mengubah aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selain menjalankan pemerintahan, *Revolutionary Command Council* bersama

¹ Ishak Mussa Al Husaini, *Ikhwanul Muslimun: Tinjauan Sejarah Sebuah Gerakan Islam (Bawah Tanah)*. Jakarta: Grafiti Pers, 1983, hlm. 177.

Aly Maher Pasha secara berangsur-angsur melakukan penyelidikan tentang Farouk.

Selama Farouk berkuasa, dunia pers seolah mati suri. Pemerintahan Mesir yang baru menasionalisasikan pers dan media berita tahun 1961.² Pada masa Raja Farouk banyak kasus yang ditutup-tutupi oleh pemerintah, terutama yang berhubungan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh raja. Baru setelah Revolusi Mesir 23 Juli 1952 dilancarkan, tabir kegelapan tersebut mulai terbuka. Pelan namun pasti, penyelidikan tentang kasus yang membelenggu Mesir terungkap. Farouk tentu merupakan dalang di balik busuknya kasus tersebut. Salah satu kasus yang banyak menjadi sorotan masyarakat Mesir adalah mengenai gagalnya Mesir dalam Perang Palestina dan peristiwa 26 Januari 1952 (Peristiwa Sabtu Hitam).

Ali Maher Pasha bersikeras akan melakukan pembersihan terhadap pejabat-pejabat pemerintahan rezim Farouk, sekaligus mengadili mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Orang-orang yang berada di belakang Farouk tidak berani lagi melakukan perlawanan terhadap *Revolutionary Command Council*. Hal tersebut memudahkan pemerintah untuk mengadakan pembersihan. Sebagian dari mereka ada yang diasingkan di suatu tempat tertentu, dilarang bepergian dari tempat tersebut, dan tidak boleh membuat paspor.

² John L Esposito, *Islam and Development Religion and Sociopolitical Change*, Alih bahasa oleh: S. H. S, *Agama dan Perubahan Sosiopolitik*. Aksara Persada Press, 1985, hlm. 190.

Pada tanggal 9 Desember 1952 Aly Maher meletakkan jabatannya sebagai perdana menteri Mesir, kemudian diganti dengan Muhammad Naguib.³ Sehari setelah turunnya Aly Maher, dibentuklah kabinet yang baru dengan menghapus konstitusi yang lama. Majelis konstitusi tersebut beranggotakan 100 orang dan 3 diantaranya berasal dari anggota Ikhwanul Muslimin. Pada saat itu, keterlibatan Ikhwanul Muslimin dalam pemerintahan memang sangat kecil.

Ikhwanul Muslimin hanya memiliki sedikit keterwakilan dalam kursi kabinet dibandingkan dengan para anggota *Revolutionary Command Council*. Ini akan semakin menyulitkan Ikhwanul Muslimin untuk membentuk pemerintahan yang bernafaskan islami di kemudian hari. Tidak hanya itu saja, Ikhwanul Muslimin bahkan hampir saja dibubarkan seiring dengan pembubaran partai politik di Mesir. Berkat tuntutan yang diajukan oleh Hudaibi, akhirnya Ikhwanul Muslimin berhasil bebas dan diperkenankan duduk dalam kursi kabinet seperti halnya *Revolutionary Command Council*.

Keadaan politik Mesir memang belum mendapat tatanan kembali sampai dengan tahun 1953. Pemerintah Mesir masih terus mencari jalan yang tepat untuk kehidupan bangsa Mesir selanjutnya. Masalah demi masalah juga menimpa pemerintahan Dewan Mangkubumi Mesir yang masih dini. Selain itu, pengadilan bagi oknum-oknum yang berada di belakang Farouk belum tuntas dilakukan. Farouk sampai dengan tahun 1953 masih berada di Italia beserta keluarganya. Terakhir kalinya keberadaan Farouk di Mesir, yaitu saat penanda-

³ Ishak Mussa Al Husaini, *op.cit.*, hlm. 177.

tanganan pernyataan lengsernya dari tahta kerajaan, kemudian berlayar ke Italia.⁴ Pada saat pelepasan jabatannya tersebut, Farouk terlihat takut dan gugup. Diketahui bahwa Farouk dan keluarganya meninggalkan Italia pada tanggal 18 Maret 1965.⁵ Saat itu Farouk berusia 45 tahun.

Pada tanggal 18 Juni 1953, *Revolutionary Command Council* mengumumkan penghapusan sistem monarki Mesir menjadi sebuah negara republik.⁶ Berkaitan dengan berdirinya Republik Mesir yang baru tersebut, segera diangkatlah presiden sebagai kepala negara. Pemerintah Mesir memang tidak banyak melakukan pertimbangan mengenai pengangkatan Muhammad Naguib sebagai presiden, namun sebenarnya Gamal Abdul Nasser lah yang memiliki ide tersebut.

Pencalonan tunggal Muhammad Naguib sebagai presiden pertama Mesir tidak banyak mendapat protes dari masyarakat Mesir, karena Muhammad Naguib terkenal dengan loyalitas dan tanggung jawabnya dalam *Free Officers* (Perwira Bebas). Selain itu, Muhammad Naguib telah lebih dari 1 kali menjabat sebagai perdana menteri di Mesir. Gamal Abdul Nasser yang terkenal dengan semangat nasionalismenya justru tidak mencalonkan dirinya sendiri sebagai presiden Mesir. Hal itu telah banyak dipertimbangkan oleh

⁴ Jules Archer, *Kisah Para Diktator: Biografi Politik Para Penguasa Fasis, Komunis, Despotis, dan Tiran*. Tangerang: Narasi, 2007, hlm. 53.

⁵ Ishak Mussa Al Husaini, *op.cit.*, hlm. 163.

⁶ Peter Mansfield, *A History of the Middle East*. Harmondsworth: Penguin Books, 1991, hlm. 244.

Gamal Abdul Nasser, karena masyarakat Mesir kurang suka dengan pemimpin yang masih muda.

Pada saat pengangkatan Muhammad Naguib menjadi presiden, Gamal Abdul Nasser berusia 35 tahun, memiliki selisih 17 tahun dengan Muhammad Naguib. Meskipun jabatan presiden ada di tangan Muhammad Naguib, namun kekuasaan Gamal Abdul Nasser tampak lebih dominan dalam kabinet.⁷ Muhammad Naguib menjadi presiden sekaligus merangkap sebagai menteri dalam negeri, sedangkan Gamal Abdul Nasser menjadi Sekretaris Jenderal *Liberation Rally*.⁸ Selain itu, para anggota *Revolutionary Command Council* juga banyak yang duduk di pemerintahan Mesir.

Pemerintahan republik yang baru lebih banyak memberikan responnya terhadap politik dan perekonomian Mesir. Memang, dalam dekade pertama pemerintahan Mesir tidak mengambil tindakan yang mengganggu kepentingan orang kaya, pengusaha industri, dan perdagangan.⁹ Pemerintahan Mesir justru meningkatkan kepentingannya dengan menghapus oligarki tradisional, melemahkan kelompok politik sayap kiri, dan menghapus serikat kerja. Kedudukan ekonomi kelas menengah yang kecil, terutama para pegawai,

⁷ Anshari Thayib dan Anas Sadaruwan, *Anwar Sadat: Di Tengah Teror dan Damai*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1981, hlm. 15.

⁸ *Liberation Rally* atau Dewan Pembebas yang dibentuk pada tanggal 23 Januari 1953 sekaligus memperingati 6 bulan Revolusi Mesir 23 Juli 1952. Dewan ini semacam front persatuan anggota partai politik Mesir yang telah dibubarkan dan anggota Ikhwanul Muslimin. Lihat Ishak Mussa Al Husaini, *op.cit.*, hlm. 178.

⁹ Eric A Nordlinger, *Militer dalam Politik: Kudeta dan Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 268.

arsitek, juru teknik, ahli ekonomi, dan para pekerja kantoran, telah meningkat dengan pesatnya di bawah pemerintahan militer.

Dalam bidang pendidikan juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini sangat terasa ketika pengisian jabatan-jabatan dalam pemerintahan, harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan calon pendaftarnya. Tentu semua ini sangat bertolak belakang dengan rezim Farouk yang mengatas-namakan kekayaan dan status warisan untuk dapat menjabat di kursi pemerintahan. Semua ini diwujudkan dalam rangka menggalakkan pertumbuhan ekonomi Mesir dan meningkatkan laju modernisasi ke arah yang lebih baik.

Dalam bidang kesehatan, setelah jatuhnya rezim kekuasaan Farouk di Mesir banyak sekali dilakukan pembenahan. Pada masa pemerintahan Raja Farouk, hanya orang kaya dan ber harta yang mendapatkan pelayanan lebih dari rumah sakit. Rakyat kelas bawah diterlantarkan dengan minimnya fasilitas kesehatan. Masa pemerintahan Muhammad Naguib terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam bidang kesehatan. Pemerintah telah menyediakan sarana dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kelas bawah, dan jaminan sosial yang lebih besar.

B. Sengketa *Revolutionary Command Council* dengan Ikhwanul Muslimin

Revolusi Mesir 23 Juli 1952 memperkenalkan faktor baru yang radikal ke dalam perimbangan politik Mesir. Para bekas *Free Officers* (Perwira Bebas) menciptakan negara otoriter yang amat terpusat di sekitar *Revolutionary*

Command Council pasca jatuhnya Farouk.¹⁰ Revolusi Mesir 23 Juli 1952 merupakan puncak dari ketidakpuasan rakyat Mesir terhadap sistem pemerintahan yang diselenggarakan oleh Raja Farouk. Peristiwa tersebut terjadi bukan tanpa sebab, melainkan sudah terencana dengan matang. Dua kekuatan yang menjadi basis dari pelaksanaan Revolusi Mesir 23 Juli 1952, yakni *Free Officers* (Perwira Bebas) dan gerakan keagamaan yang terhimpun dalam Ikhwanul Muslimin.

Free Officers (Perwira Bebas) merupakan bagian yang sangat penting bagi perwujudan Revolusi Mesir 23 Juli 1952. Pelopor adanya Revolusi Mesir 23 Juli 1952, Gamal Abdul Nasser sendiri merasa sangat perlu dilaksanakannya misi Revolusi Mesir 23 Juli 1952 di bawah komando *Free Officers* (Perwira Bebas), dengan dukungan kuat dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin memberikan dukungan bagi pelaksanaan Revolusi Mesir 23 Juli 1952 tentu bukan tanpa alasan. Kelompok yang tergabung dalam Ikhwanul Muslimin memiliki simpati terhadap perjuangan perubahan Mesir.

Ikhwanul Muslimin sangat membenci sekulerisasi yang ditanamkan oleh pemerintahan Inggris, karena dapat melunturkan nilai-nilai Islam yang merupakan ancaman mematikan bagi dunia Islam. Revolusi Mesir 23 Juli 1952 menolak pengaruh barat (Inggris) karena bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan religiusitas Mesir. Selain itu, pengaruh barat secara potensial membawa orang-orang Arab tersesat dari jalan Islam yang benar. Maka dari

¹⁰ John L Esposito, Judul asli tidak dicantumkan, Alih bahasa oleh A. Rahman Zainuddin, *Identitas Islam pada Perubahan Sosial-Politik*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 106.

itu, Ikhwanul Muslimin memberikan dukungan sepenuhnya terhadap jalannya Revolusi Mesir 23 Juli 1952. Meskipun pada saat Revolusi Mesir 23 Juli 1952 berlangsung, pemimpin Ikhwanul Muslimin memilih mengasingkan diri. Tetapi, para pengikut Ikhwanul Muslimin lainnya memberikan bantuan terhadap jalannya revolusi.

Revolusi Mesir 23 Juli 1952 di Mesir disambut baik oleh rakyat dan tentara, karena dengan demikian telah tersingkirkan pimpinan yang tidak mendapatkan kepercayaan di bawah Raja Farouk yang merupakan seorang boneka Inggris dan telah menunjukkan ketidakberdayaannya dalam masalah Palestina.¹¹ Pasca Revolusi Mesir 23 Juli 1952, terdapat perubahan-perubahan yang signifikan dalam tubuh Mesir. Baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan mengalami perubahan. Revolusi Mesir 23 Juli 1952 memiliki agenda tersendiri bagi perbaikan Mesir.

Revolusi Mesir 23 Juli 1952 merupakan puncak dari kerjasama antara *Revolutionary Command Council*¹² dengan Ikhwanul Muslimin didasarkan pada tujuan yang sama, yaitu mengusir penguasa asing di Mesir dan menumbangkan kekuasaan Farouk. Bertolak dari hal tersebut, sebenarnya antara *Revolutionary Command Council* dengan Ikhwanul Muslimin terjadi perbedaan yang cukup tajam mengenai akhir perjuangan Revolusi Mesir 23

¹¹ John L Esposito, *op.cit*, hlm. 185.

¹² Dalam bab ini lebih cenderung menggunakan sebutan *Revolutionary Command Council* daripada *Free Officers* (Perwira Bebas), karena peristiwa sengketa terjadi pasca Revolusi Mesir 23 Juli 1952. *Free Officers* (Perwira Bebas) mengubah namanya setelah berhasil menggulingkan kekuasaan Farouk, dan memiliki dominasi lebih besar dalam pemerintahan dibandingkan dengan Ikhwanul Muslimin.

Juli 1952. *Revolutionary Command Council* di bawah Gamal Abdul Nasser jelas akan membawa Mesir ke arah pemerintahan yang lebih modern. Sejak awal, hal ini sebenarnya sudah dipersiapkan. Hanya saja Ikhwanul Muslimin belum begitu menyadari dan menganggap bahwa Revolusi Mesir 23 Juli 1952 merupakan batu loncatan untuk menegakkan negara Islam yang jauh dari sekulerisme.

Tidak, ide dimulai jauh sebelum itu. Itu lebih jauh lagi bahkan dari tanggal 16 Mei 1948, hari yang menandai awal keterlibatan saya dalam Perang Palestina. Ketika saya sekarang mencoba untuk mengingat rincian dari pengalaman kami di Palestina Perang, saya menemukan hal yang aneh: kita sedang bertempur di Palestina, tetapi impian kami berpusat di Mesir. Peluru kami ditujukan pada musuh dalam parit sebelum kita, tapi hati kita melayang di atas negeri yang jauh, yang kami telah meninggalkan untuk perawatan dari serigala.¹³

Gamal Abdul Nasser menegaskan bahwa ide pembaharuan Mesir sudah ada sejak lama, bahkan saat Perang Palestina berkobar. Keikutsertaan Gamal Abdul Nasser dalam perang tersebut semakin meningkatkan rasa nasionalisme sebagai generasi muda Mesir, khususnya sebagai perwira militer. Jadi, tidak mengherankan apabila *Revolutionary Command Council* menanggapi dengan tangan terbuka berubahnya pemerintahan monarki Mesir menjadi republik yang kebarat-baratan.

¹³ Terjemahan bebas dari “No, the idea started long before that. It was further back even than May 16, 1948, the day which marked the beginning of my involvement in the Palestine War. When I now try to recall the details of our experience in Palestine War, I find a curious thing: we were fighting in Palestine, but our dreams were centered in Egypt. Our bullets were aimed at the enemy in his trenches before us, but our hearts hovered over our distant country, which we had left to the care of the wolves.” Lihat Gamal Abdul Nasser, *The Philosophy of The Revolution*. Cairo: Ministry of National Guidance Information Administration, TT, hlm. 12.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin sejak awal merasa khawatir dengan perkembangan Mesir selanjutnya. Perubahan pemerintahan monarki menjadi republik dirasa akan semakin memicu sekulerisme dalam pemerintahan yang lebih modern. Semua itu tentu akan semakin menjauhkan Ikhwanul Muslimin dari cita-cita untuk membentuk pemerintahan yang bersumber pada Al-Qur'an.

Perbedaan pendapat dan kepentingan terus terjadi antara *Revolutionary Command Council* dengan Ikhwanul Muslimin. Kedua belah pihak sadar, bahwa persatuan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.¹⁴ *Revolutionary Command Council* tidak yakin bahwa Ikhwanul Muslimin memahami semangat dan cita-cita revolusi, begitu juga dengan Ikhwanul Muslimin yang menganggap *Revolutionary Command Council* tidak mengerti kemauan mereka. Jurang pemisah semakin lebar antara keduanya.

Pada perkembangan selanjutnya, Ikhwanul Muslimin berupaya mencari dukungan dari luar untuk menunjang kegiatan-kegiatan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin mengarahkan perhatiannya kepada Angkatan Darat dan Polisi dengan cara melakukan pertemuan sekali dalam seminggu, dalam rangka mempererat hubungan ketiganya. Selain menghimpun kekuatan Angkatan Darat dan Polisi, Ikhwanul Muslimin juga menarik simpati Sarikat Buruh yang ada di Mesir. Ikhwanul Muslimin berupaya menguasai kelompok tersebut dan merencanakan kudeta pada 15 Januari 1954.¹⁵

¹⁴ Ishak Mussa Al Husaini, *op.cit.*, hlm. 179.

¹⁵ *Ibid.*,

Kudeta yang direncanakan pada tanggal 15 Januari 1954 tersebut pada akhirnya menuai kegagalan, karena 3 hari sebelumnya pemerintah Mesir melakukan penahanan terhadap para anggota Ikhwanul Muslimin yang diduga menelikung pemerintah dari belakang saat berunding dengan Inggris. Ratusan anggota Ikhwanul Muslimin ditahan, termasuk pemimpinnya Hudaibi. Pemerintah merasa mempunyai alasan yang cukup untuk membubarkan Ikhwanul Muslimin. Pemikiran Ikhwanul Muslimin dirasa sudah tidak sejalan lagi dengan pemerintah Mesir yang mayoritas berasal dari orang-orang di bawah *Revolutionary Command Council*. Para anggota *Revolutionary Command Council* yang disegani Ikhwanul Muslimin sudah tidak mampu lagi menjaga perdamaian di antara kedua belah pihak.

Di sisi lain, Ikhwanul Muslimin juga sudah merasa jenuh dengan perbedaan kepentingan maupun pemikiran dengan pemerintahan Mesir. Ikhwanul Muslimin sudah menentukan jalannya sendiri yang condong pada pertumpahan darah. Ikhwanul Muslimin terhitung beberapa kali melakukan demonstrasi secara radikal yang menelan korban jiwa. Demonstrasi yang pertama dilakukan di sekat masjid Universitas Al-Azhar, Kairo. Dalam peristiwa tersebut, 8 orang mahasiswa terbunuh, dan 20 orang lainnya luka-luka.

Demonstrasi yang kedua terjadi di dekat Hotel Semiramis, menewaskan 1 orang mahasiswa dan 15 lainnya luka-luka. Selain melakukan demonstrasi secara radikal, Ikhwanul Muslimin juga menjalin hubungan eksternal dengan Damaskus. Terbukti dengan diselenggarakannya konferensi

untuk melancarkan kampanyenya dalam rangka menentang pemerintahan Mesir yang revolusioner dan pembubaran Ikhwanul Muslimin. Hudaibi dan para pengikutnya dengan getol memperjuangkan nasib Ikhwanul Muslimin agar tetap memiliki eksistensi dalam pemerintahan dan masyarakat Mesir.

Pengadilan terhadap Ikhwanul Muslimin terus dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas keamanan Mesir. Organisasi tersebut pada akhirnya dibubarkan oleh pemerintahan Gamal Abdul Nasser.

Kami memaafkan mereka dan memanggil mereka Saudara
Berharap sang waktu meredakan sengketa
Tapi bila kejahatan menghadapkan muka
Dan permusuhan satu-satunya yang tersisa
Kami siap dengan balasan yang sama¹⁶

Pembubaran Ikhwanul Muslimin memberikan kesempatan pada *Revolutionary Command Council* untuk menundukkan semua lembaga agama ke bawah kekuasaan negara dan mengadakan penyelesaian sendiri terhadap masalah-masalah agama dan kebudayaan Mesir yang amat kompleks. *Revolutionary Command Council* juga mengembangkan penyelesaian yang radikal terhadap masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum syari'at.¹⁷

C. Tampilnya Gamal Abdul Nasser sebagai Presiden Mesir

Pasca beralihnya Mesir pada sistem pemerintahan republik, Mesir masih dihadapkan dengan berbagai pertikaian politik baik secara internal maupun eksternal. Konflik antara pemerintah dengan Ikhwanul Muslimin

¹⁶ Kutipan dari penyair Arab al-Finduz Zamani yang sering diungkapkan oleh Ikhwanul Muslimin sebagai rasa kecewa mereka terhadap Pemerintah Mesir yang didominasi oleh pejuang *Revolutionary Command Council*. Lihat Ishak Mussa Al Husaini, *op.cit.*, hlm. 182.

¹⁷ John L Esposito, *op.cit.*, hlm. 106-107.

berujung pada pertikaian radikal dan pembubaran gerakan tersebut. Gamal Abdul Nasser dan Muhammad Naguib adalah dua orang yang sama-sama memusuhi Ikhwanul Muslimin, terutama setelah gerakan tersebut mengadakan beberapa demonstrasi militer.

Tampilnya Muhammad Naguib sebagai presiden pertama Republik Mesir, tidak menyulutkan niat dan usaha Gamal Abdul Nasser untuk tetap melakukan dominasi dalam pemerintah. Dalam pandangan masyarakat, Muhammad Naguib dan Gamal Abdul Nasser sama-sama memiliki kharisma sebagai pemimpin. Namun, Gamal Abdul Nasser jauh lebih muda daripada Muhammad Naguib. Selain itu, pada masa pemerintahan Farouk Muhammad Naguib pernah menjabat sebagai perdana menteri menggantikan Aly Maher Pasha. Farouk juga pernah memberikan kepercayaan kepada Muhammad Naguib saat Mesir terjadi keributan pada bulan Juli 1952.

Muhammad Naguib dan Gamal Abdul Nasser sama-sama memiliki kepentingan dalam pemerintahan Mesir. Sering terjadi perselisihan pendapat di antara keduanya, namun perselisihan tersebut dapat diredamkan. Ketika menghadapi permasalahan terkait dengan Ikhwanul Muslimin, keduanya juga memiliki pandangan yang berbeda. Muhammad Naguib menilai bahwa peristiwa 28 Maret 1954¹⁸ merupakan kudeta kedua, setelah kudeta 23 Juli 1952 yang lebih dikenal dengan sebutan Revolusi Mesir 23 Juli 1952.

¹⁸ Pada tanggal 28 Maret 1954 terjadi pemogokan umum yang bertepatan dengan pembentukan Dewan Pembebasan. Peristiwa ini dipelopori oleh Ikhwanul Muslimin bekerjasama dengan sarekat buruh Mesir untuk mengadakan pemogokan terhadap pemerintah. Akibat peristiwa tersebut, para anggota Ikhwanul Muslimin ditangkap dan dijebloskan ke dalam tahanan. Lihat Ishak Mussa Al Husaini, *op.cit.*, hlm. 181.

Muhammad Naguib tidak bisa mengendalikan keadaan, sehingga Gamal Abdul Nasser harus tampil ke depan mengepalai sebuah pemerintahan militer untuk meredakan konflik.

Peranan Gamal Abdul Nasser semakin tampak ketika ia menjadi pimpinan delegasi perundingan yang akan membicarakan konflik Terusan Suez, antara Inggris dengan Mesir pada tanggal 27 Juli 1954. Mulai saat itulah mata dunia melihat Gamal Abdul Nasser sebagai perwira muda yang mampu membawa perubahan besar bagi Mesir. Gamal Abdul Nasser dengan pelan namun pasti menggeser pamor Muhammad Naguib sebagai presiden Mesir.

Konflik antara Muhammad Naguib dan Gamal Abdul Nasser sebenarnya sudah dimulai sejak proses peralihan pemerintahan monarki ke republik. Pada saat itu, Muhammad Naguib sebagai presiden terpilih ingin langsung mengadakan pemilu untuk memilih anggota parlemen dan mengembalikan pemerintahan negara ke tangan sipil. Namun, Gamal Abdul Nasser berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah memulihkan keadaan sosial dan ekonomi yang hancur pasca Revolusi Mesir 23 Juli 1952 terlebih dahulu, kemudian barulah dilaksanakan pemilu. Gamal Abdul Nasser memang secara intensif mengikuti perkembangan politik Mesir dan tidak segan-segan untuk turun tangan apabila dirasa perlu. Gamal Abdul Nasser selalu memberikan catatan kecil kepada Muhammad Naguib setiap pengambilan kebijakan pemerintahan. Muhammad Naguib ibarat boneka yang disetir oleh Gamal Abdul Nasser untuk mewujudkan keinginannya. Namun, Muhammad Naguib

tampaknya tidak hanya ingin menjadi boneka dari Gamal Abdul Nasser yang jauh di bawah kedudukannya.¹⁹

Ketegangan antara Gamal Abdul Nasser dan Muhammad Naguib semakin memanas. Gamal Abdul Nasser yang berusia jauh lebih muda kini tidak segan-segan untuk menegur atau menekan Muhammad Naguib sebagai presiden. Pemilu yang sejak terbentuknya republik sudah diidam-idamkan oleh Muhammad Naguib akhirnya terlaksana. Pemilu dilaksanakan pada bulan Juni 1956. Pada saat itu, Gamal Abdul Nasser berusia 39 tahun dan memiliki karir melesit dalam pemerintahan Mesir. Selain itu, kharisma Gamal Abdul Nasser sebagai pemimpin sangat populer di mata masyarakat.

Dalam pemilu tersebut, akhirnya Gamal Abdul Nasser terpilih sebagai presiden menggantikan Muhammad Naguib. Hal tersebut merupakan cita-cita Gamal Abdul Nasser sejak awal, yaitu menundukkan pemerintahan Mesir di bawah kekuasaannya. Tampilnya Gamal Abdul Nasser rupanya membuat Muhammad Naguib harus berada pada pesakitan. Muhammad Naguib dijebloskan ke tahanan rumah dan karir politiknya semakin lama semakin surut. Gamal Abdul Nasser tampil sebagai penguasa *defacto* Mesir pada tanggal 18 Juni 1956.²⁰

¹⁹ Anshari Thayib dan Anas Sadaruwan, *op.cit.*, hlm. 17.

²⁰ Alan R Taylor, *The Arab Balance of Power*, Alih bahasa oleh: Abubakar Basyarahil, *Pergeseran-pergeseran Aliansi dalam Sistem Perimbangan Kekuatan Arab*. Jakarta: Amar Press, 1982, hlm. 47.